

Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi di Samarinda

Eddy Fathurachmi^{1*}, Renny Wirawan²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Email: ¹ enny.fathurachmi@unmul.ac.id, ² rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

15 September 2022

Received in revised form:

25 September 2022

Accepted:

10 Oktober 2022

Keyword:

Learning model;

Anti-Corruption

Education;

College

Kata Kunci:

Model Pembelajaran;

Pendidikan Anti Korupsi;

Perguruan Tinggi

ABSTRACT

This study aims to compare the anti-corruption education learning model with a predetermined location and measure the effectiveness of the learning model. The type of research used in this study is comparative. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and questionnaires as well as literature study. Observations were made to dig up information regarding the implementation of Anti-Corruption Education courses in the four selected Universities. The data analysis technique was carried out using a narrative-interpretative qualitative method in which the data obtained would be narrated and interpreted using the theory and concept measurement tools used. The results of the study indicate that the Higher Education as an institution that has the authority to do so has prepared its foundation. This is a form of strong commitment to the nation on the phenomenon of corruption in Indonesia. Although not all Universities have made Anti-Corruption Education courses as a separate subject in their institutions, the content of Anti-Corruption Education itself has long been included in certain courses. Various universities through their study programs have interpretations of the Anti-Corruption Education module. One of the study programs at universities in Samarinda is the Unmul International Relations Study Program which emphasizes the participatory approach model which technically provides many projects in the delivery of Anti-Corruption Education courses.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pembelajaran Pendidikan anti Korupsi dengan lokasi yang telah ditentukan dan mengukur keefektifan model pembelajarannya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket serta studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di empat Perguruan Tinggi yang dipilih. Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif naratif-interpretatif dimana data-data yang diperoleh akan dinarasikan dan diinterpretasikan dengan alat ukur teori dan konsep yang dipergunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dikti sebagai institusi yang memiliki kewenangan akan hal tersebut telah mempersiapkan landasannya. Hal ini merupakan bentuk komitmen kuat pada bangsa akan fenomena korupsi di Indonesia. Meskipun belum semua Perguruan Tinggi menjadikan Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai satu mata kuliah tersendiri di institusinya, namun muatan Pendidikan Anti Korupsi sendiri telah lama dimasukkan dalam mata kuliah tertentu. Berbagai Perguruan tinggi lewat Program Studinya memiliki interpretasi terhadap modul Pendidikan Anti Korupsi. Dari Program Studi di Perguruan Tinggi di Samarinda salah satunya Program Studi Hubungan Internasional Unmul menekankan pada model participatory approach dimana secara teknis banyak memberikan project dalam penyampaian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: enny.fathurachmi@unmul.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia pernah mendapatkan gelar sebagai negara terkorup di dunia ketika pertama kali di terbitkan Indeks Persepsi Korupsi pada 15 Juli 1995. Tentunya hak itu bukan sebuah prestasi yang membanggakan mengingat citra sebagai negara terkorup itu juga mempengaruhi sendi perekonomian. Pemerintah melakukan berbagai perbaikan termasuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menekan indeks korupsi di Indonesia.

Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sedikit memperlihatkan hasil ketika pada tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Saat ini menurut data Transparansi Internasional Indonesia memiliki skor 38 naik satu poin jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang menempatkan Indonesia pada posisi 89 dari 180 negara yang melakukan korupsi. Posisi pertama sebagai negara dengan indeks korupsi tertinggi adalah Selandia baru dengan skor 89. Sementara itu posisi paling bawah dengan Indeks Korupsi terendah adalah Somalia dengan skor 9 yang berarti menjadi negara paling korup di dunia. Selandia Baru yang sampai saat ini masih menempati posisi tertinggi sebagai negara dengan Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi menjadikan elemen pendidikan menjadi elemen yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap anti korupsi.

Berbagai upaya secara internal dan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk terus melakukan perbaikan dan penanganan tindakan korupsi. Secara eksternal ada komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi atas pemberantasan tindakan korupsi oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Indonesia sendiri menandatangani perjanjian internasional dalam bentuk Konvensi Anti Korupsi dikeluarkan oleh UNCAC pada 18 Desember 2003. Dari penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan meratifikasi dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai upaya internal. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum untuk melaksanakan penanganan tindakan korupsi di Indonesia.

Penguatan upaya internal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan tindakan korupsi membutuhkan peran dari berbagai pihak. Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) menjadi elemen yang strategis untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan pencegahan tindakan korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan merupakan proses pembelajaran secara terus menerus dan merupakan investasi jangka panjang. Perguruan tinggi sendiri memiliki nilai strategis mengingat sejarah perubahan yang terjadi di Indonesia banyak dimotori oleh mahasiswa. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam Pendidikan Anti Korupsi dapat menempatkan mahasiswa sebagai target dan juga sebagai agent dengan model pembelajaran yang efektif.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya model pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang berbeda-beda di Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan interpretasi, inovasi dan kreativitas yang berbeda pula yang dilakukan oleh pengajar atau mentor pada pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi. Hal ini tentunya juga mempengaruhi tingkat pemahaman, antusiasme dan nilai-nilai yang diterima oleh mahasiswa. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pembelajaran Pendidikan anti Korupsi dengan lokasi yang telah ditentukan dan mengukur keefektifan model pembelajarannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah komparatif dimana penelitian ini akan membandingkan model pembelajaran pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan pada empat Perguruan Tinggi yang telah dipilih dengan lokus di kota Samarinda.

Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data-data primer digali dari sumber-sumber langsung melalui pengumpulan data lapangan seperti materi pengajaran yang diberikan dan dokumen panduan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi yang dikeluarkan oleh Dikti maupun modul-modul dari KPK, sementara data sekunder diperoleh dari referensi-referensi yang menunjang dalam pengolahan data.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket serta studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di empat Perguruan Tinggi yang dipilih. Kemudian dilakukan wawancara pada pengajar maupun mentor yang mengampu pengajaran tersebut. Selanjutnya angket disebarakan kepada mahasiswa diawal observasi untuk menggali data awal mengenai pemahaman mengenai materi Pendidikan Anti Korupsi yang selama ini diberikan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk mencari referensi-referensi yang relevan dalam mendukung pengolahan data yang dibutuhkan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif naratif-interpretatif dimana data-data yang diperoleh akan dinarasikan dan diinterpretasikan dengan alat ukur teori dan konsep yang dipergunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi telah direkomendasikan oleh Kemenristek Dikti setelah melakukan MoU dengan KPK. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pendidikan tinggi akan persoalan korupsi di Indonesia. Meskipun tidak semua Perguruan Tinggi di Indonesia menyajikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, namun substansi Pendidikan Anti Korupsi juga dimasukkan dalam mata kuliah tertentu.

Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Program Studi Hubungan Internasional Unmul

Pada Program Studi Hubungan Internasional, pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebelumnya mengikuti training internal yang dilakukan oleh Universitas Mulawarman. Dalam training pengampu dibekali modul yang telah disusun oleh Dikti dan dijadikan acuan dalam penyusunan RPS dan RPP dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di Program Studi Hubungan Internasional, mata kuliah ini ditawarkan disemester 2. Pertemuan kelas yang dilakukan adalah maksimal 16 kali pertemuan dan dibagi dalam dua cluster pertemuan utama. Pembagian cluster tersebut sebagai acuan dalam penilaian tengah semester dan akhir semester.

Pada cluster pertama pertemuan, pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi lebih menekankan pada penyajian materi dasar secara teoritis mengenai konsep Korupsi dan membedah kasus-kasus korupsi. Namun demikian diawal cluster pertama juga diinformasikan kepada mahasiswa tentang project direct participatory. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil sebagai persiapan kegiatan mandiri dalam project direct participatory. Kelompok-kelompok kecil tersebut diberi nama yang memiliki makna dan unsur anti korupsi.

Pada cluster kedua pertemuan, pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi lebih menekankan pada pembuatan project direct participatory. Project tersebut terdiri dari beberapa varian project meliputi:

1. Pembuatan video kampanye anti korupsi
2. Pembuatan video peran dengan tema anti korupsi
3. Pembuatan stiker kampanye anti korupsi
4. Pembuatan *handycraft* kampanye anti korupsi
5. Pembuatan materi sosialisasi ke sekolah-sekolah

Pembuatan video, stiker maupun *handycraft* dijadikan modal untuk melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah yang dipilih. Pilihan sekolah merupakan kesepakatan kelas baik pada level Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun Perguruan Tinggi. Prinsip yang ingin dibangun pada mata kuliah ini Pendidikan Anti Korupsi adalah menyebarkan semangat dan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga mahasiswa bisa menjadi garda terdepan untuk melakukan pendekatan dan sebagai pelaku langsung sosialisasi di sekolah. Alasan mahasiswa merupakan pelaku yang strategis untuk melakukan sosialisasi adalah kedekatan generasi dimana faktor komunikasi dan gaya hidup dapat mempermudah model pendekatan sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah yang dipilih.

Program Studi Administrasi Negara Unmul

Pada Program Studi Administrasi Negara, pengampu mata kuliah pendidikan Anti Korupsi pernah mengikuti ToT yang diselenggarakan oleh KPK untuk seluruh perwakilan PTN/PTS Angkatan X di Banjarmasin. Pengampu mata kuliah juga memiliki modul serta RPS dan RPP.

Proses dan metode pembelajaran yang dilakukan pada Prodi Administrasi Negara diawali dari pertemuan pekan pertama dan kedua yang diisi dengan bangunan teoritik kemudian diikuti dengan diskusi interaktif yang berfokus pada studi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Alhasil, mahasiswa harus mawas dengan berita perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Model ini dirasa tepat untuk memantik daya pikir kritis mahasiswa dan fakta lapangan. Mendekati pekan akhir mahasiswa juga diminta untuk diskusi kelompok menganalisa kasus korupsi dan mempresentasikannya. UTS dilakukan take-home dengan model soal analisis studi kasus. Sedangkan UAS dilakukan tertulis pada pekan ujian yang berisi soal studi kasus dan analisis teori.

Program Studi Ilmu Pemerintahan Unmul

Di Program Studi Ilmu Pemerintahan, pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi mengikuti pelantikan yang diadakan secara internal oleh Universitas Mulawarman. Pengampu mata kuliah juga dibekali modul pengajaran yang dijadikan dasar dalam penyusunan RPS dan RPP. Pertemuan dalam satu semester dilakukan maksimal 16 kali tatap muka. Instrumen yang dilakukan sebagai penilaian mahasiswa ada 2 yaitu melalui Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Metode pengajaran yang dilakukan di program Studi Ilmu Pemerintahan lebih pada pemberian materi dari modul yang ada. Tidak ada tugas project namun dilakukan diskusi kelompok. Penilaian ujian secara tertulis.

Program Studi Psikologi Unmul

Di Program Studi Psikologi, pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi mengikuti pelatihan yang diadakan secara internal oleh Universitas Mulawarman. Pengampu memiliki modul yang dijadikan dasar dalam pemnuatan RPS dan RPP. Pertemuan dalam satu semester sebanyak 15 kali tatap muka dan 4 kali pertemuan bebas. Instrumen yang dipergunakan sebagai penilaian meliputi:

1. Kehadiran
2. Ujian Tengah Semester
3. Ujian Akhir Semester
4. Nilai etika

Metode perkuliahan yang dipergunakan adalah dengan model diskusi dan juga project kampanye di area yang ditentukan oleh pengampu mata kuliah seperti di GOR Sempajaserata pembuatan leaflet kampanye dalam bentuk soft file. Kelas juga dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari maksimal 5 orang. Penamaan kelompok tidak secara khusus untuk kepraktisan hanya menggunakan penomoran seperti kelompok 1,2 dan seterusnya. Selain tugas project dalam perkuliahan juga dilakukan kuliah lapangan dengan melakukan kunjungan di Pengadilan Tipikor dan mengamati persidangan Tipikor yang sedang dilakukan. Sebagai tugas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam

Pertemuan sebelum UTS diisi dengan materi pada 2 (tiga) pertemuan yaitu pertemuan ke-2 dan ke-6, dilanjutkan dengan library research hingga pekan sebelum UTS. Setelah UTS, kelompok mahasiswa berkonsultasi dengan dosen mengenai proyek akhir kelas hingga pekan ke-3 pasca UTS dan dilanjutkan dengan eksekusi proyek. Penilaian UTS disandarkan pada wawasan mahasiswa yang diujikan melalui soal tertulis dalam lingkup studi kasus dan dilakukan secara daring.

Tugas akhir proyek yang dimaksud adalah mahasiswa berkelompok membuat video pendek yang berisi rekaman role play atas sebuah skenario yang berkaitan dengan anti-korupsi. Proyek ini kemudian di tampilkan dan dinilai saat UAS. Merujuk pada konsep Pendidikan Anti Korupsi dengan mengadopsi pada model *Taksonomi Bloom* dimana pendidikan harus terdiri dari tiga dimensi yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik maka akan diaplikasikan pada model pengajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diterapkan di dua Perguruan Tinggi yang diteliti.

1. Dimensi Kognitif

Di keempat Program Studi yang diteliti pada Universitas Mulawarman memasukkan unsur-unsur kognitif dalam model pembelajaran yang disajikan pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Sedangkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam juga memasukkan unsur kognitif dalam model pembelajaran yang dilakukan. Kedua Perguruan Tinggi tersebut memberikan dasar pengetahuan tentang konsep Korupsi dan perbedaan tindakan korupsi dan perilaku koruptif. Selain itu juga memberikan pemahaman-pemahaman lain berupa pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, upaya pencegahan dan penanganan korupsi serta peran mahasiswa.

2. Dimensi Afektif

Di keempat Program Studi yang diteliti pada Universitas Mulawarman memasukkan unsur-unsur afektif dalam model pembelajaran yang disajikan pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Sedangkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam juga memasukkan unsur kognitif dalam model pembelajaran yang dilakukan. Kedua Perguruan Tinggi tersebut memberikan dasar nilai-nilai pendidikan anti korupsi serta semangat untuk melakukan gerakan anti korupsi.

3. Dimensi Psikomotorik

Untuk dimensi psikomotorik tidak semua Program Studi di Universitas Mulawarman memasukan dimensi psikomotorik dalam Rencana Pengajarannya. Hal itu terlihat dari metode pengajaran dan instrumen penilaian yang diberikan pada mahasiswa. Hanya dua program studi yang memasukan dimensi Psikomotorik yaitu Program Studi Hubungan Internasional dan Program Studi Psikologi. Dalam dimensi psikomotorik lebih menekankan pada kreatifitas dan penciptaan. Pada Program Studi Hubungan Internasional dimensi psikomotorik melalui tugas project kelompok yang menjadi instrumen penilaian akhir pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk berkreasi dalam projectnya untuk membuat alat peraga sosialisasi anti korupsi. Hal serupa juga pada Program Studi Psikologi dimana mahasiswa juga diberikan project tugas akhir untuk melakukan kampanye maupun sosialisasi anti korupsi. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda memasukkan dimensi psikomotorik dalam RPS. Hal tersebut terlihat dari instrumen penilaian yang diberikan pada mahasiswa. Pengampu memberikan tugas project pembuatan video yang berisi role play mengenai kasus korupsi yang kemudian dipresentasikan didepan kelas dadijadikan penilaian UAS.

Efektivitas Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Dalam teori yang dimaksud efektivitas hampir semua definisi mengarah pada ketercapaian target sesuai dengan yang direncanakan. Merujuk pada empat indikator efektivitas David Krech maka at et.al. Maka dalam penelitian ini ukuran efektivitas adalah ketercapaian dan luaran. Adapun yang dimaksud dengan ketercapaian adalah tercapainya pembelajaran sesuai dengan RPS yang di rancang. Sementara itu yang dimaksudkan dengan luaran adalah hasil karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dari project yang ditugaskan maupun *feedback* mahasiswa.

Dari hasil kuisioner yang disebarkan pada mahasiswa pada 4 Program Studi di Unmul dan 1 Fakultas di Unwagama yang mengambil mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Tabel 1. Hasil Kuisioner Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

No	Instrumen Pertanyaan	Hasil				
		Prodi HI	Prodi AN	Prodi IP	Prodi Psikologi	FISIP UWGM
1.	Apakah ada proyek akhir dalam mata kuliah ini?	Ada = 39 orang	Ada = 38 orang	Ada = 40 orang	Ada = 39 orang	Ada = 32 orang
		Tidak ada = 0 orang	Tidak ada = 38 orang	Tidak ada = 40 orang	Tidak ada = 0 orang	Tidak ada = 6 orang
2.	Apakah kelas ini menuntut saudara/i untuk berkreasi	Ya = 40 orang	Ya = 22 orang	Ya = 13 orang	Ya = 30 orang	Ya = 27 orang

	dan berinovasi dalam mengerjakan tugas?	Tidak= 0 orang	Tidak= 15 orang	Tidak= 27 orang	Tidak= 9 orang	Tidak= 11 orang
3.	Berikan penilaian terhadap metode yang digunakan dalam proses	Sangat Puas= 34 orang	Sangat Puas= 25 orang	Sangat Puas= 15 orang	Sangat Puas= 20 orang	Sangat Puas= 22 orang

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pendidikan merupakan fondasi yang kuat untuk mengajarkan dan membentuk karakter anak bangsa. Pemerintah sangat menyadari akan hal tersebut dengan membuat kebijakan penguatan dalam pembentukan karakter anak bangsa melalui kurikulum di dunia Perguruan Tinggi. Dikti sebagai institusi yang memiliki kewenangan akan hal tersebut telah mempersiapkan landasannya. Hal ini merupakan bentuk komitmen kuat pada bangsa akan fenomena korupsi di Indonesia. Meskipun belum semua Perguruan Tinggi menjadikan Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai satu mata kuliah tersendiri di institusinya, namun muatan Pendidikan Anti Korupsi sendiri telah lama dimasukkan dalam mata kuliah tertentu. Berbagai Perguruan tinggi lewat Program Studinya memiliki interpretasi terhadap modul Pendidikan Anti Korupsi. Dari Program Studi di Perguruan Tinggi di Samarinda salah satunya Program Studi Hubungan Internasional Unmul menekankan pada model participatory approach dimana secara teknis banyak memberikan project dalam penyampaian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Meskipun ada Program Studi lain seperti Program Studi Psikologi Unmul dan Fisipol Universitas Widya Gama juga memberikan project namun model dari Program Studi Hubungan Internasional Unmul lebih memberikan tantangan dan efektif sehingga dapat dijadikan model dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Rekomendasi

Melihat begitu besarnya manfaat mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi pembentukan karakter di Perguruan Tinggi maka perlu dilakukan:

1. Penjelasan secara teknis pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi lewat Training dari Dikti terhadap pengampu mata kuliah tersebut.
2. Forum Diskusi dan *Sharing* antar pengajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada regional dan wilayah tertentu.
3. Penyusunan modul bersama untuk dijadikan model pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB/OECD 2011, *Anti-corruption policies in Asia and the Pacific*, diakses dari [\[https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/policyanalysis/35022355.pdf\]](https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/policyanalysis/35022355.pdf) tanggal 12 Juni 2019.
- Assegaf, Abdurachman, 2017, 'Curbing corruption through tertiary education in Indonesia and Japan: analysis on legal system and Islamic perspective', *Analisa*, 2(2), 161-305.
- Cameron, Kim, 1978, 'Measuring organizational effectiveness in institution of higher education', *Administrative Science Quarterly*, 23, 604-629.
- Holmes, Leslie, 2006, *Rotten states? Corruption, post-communism and neoliberalism*, Duke University Press, Durham. Indeks 0 mengindikasikan korupsi semakin tinggi, Indeks 100 menunjukkan semakin bersih dari korupsi, Trnasparansi Internaisonal di

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-1-poin-menjadi-38>

- Kemristekdikti 2018, 'Pendidikan antikorupsi akan ditetapkan di semua jenjang', Siaran pers No. 338/SP/HM/BKPP/XII/2018, diakses dari [<https://www.ristekdikti.go.id/kabar/pendidikan-anti-korupsi-akan-diterapkan-di-semua-jenjang-pendidikan-2/>] tanggal 12 Juni 2019.
- Kurer, Oskar, 2015, 'Definitions of corruption', in P.M. Heywood (ed.), *Routledge handbook of political corruption*, Routledge, Abingdon, 30-41.
- Lidinillah, Dindin A.M., "Pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*)," *Jurnal Online UPI*, (2015), diakses melalui [[http://file.upi.edu/Direktori/KD-TASIKMALAYA/DINDIN_ABDUL_MUIZ_LIDINILLAH_\(KD-TASIKMALAYA\)-197901132005011003/132313548%20-%20dindin%20abdul%20muiz%20lidinillah/Problem%20Based%20Learning.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/KD-TASIKMALAYA/DINDIN_ABDUL_MUIZ_LIDINILLAH_(KD-TASIKMALAYA)-197901132005011003/132313548%20-%20dindin%20abdul%20muiz%20lidinillah/Problem%20Based%20Learning.pdf)] pada 14 Juni 2019.
- Manurung, Rosida T., 2012, 'Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik', *Jurnal Sositologi*, 27, 232-244.
- Nye, Joseph S., 1989, 'Political corruption: a cost-benefit analysis', in A.J. Heidenheimer et al. (eds.), *Political corruption: a handbook*, Transaction, New Jersey.
- Pendidikan di Selandia Baru Berperan Tekan Korupsi
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/05/21/mn5og3-pendidikan-di-selandia-baru-berperan-tekan-korupsi>
- Scott, James C., 1972, *Comparative political corruption*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Sen, Parama, 2017, 'Do Asian values still exist? Revisiting the roots in search of a plausible future', *South Asian Survey*, 21(1-2), pp, 51-63.
- Thompson, Jeff, 1993, *Developing education*, New Grace Inc., Toronto.
- Wulandari, Fitiria E., "Pengaruh pembelajaran berbasis proyek untuk melatih keterampilan proses mahasiswa," *Jurnal Pedagogia*, vol. 5, no. 6 (Agus 2016).
- Zollman, Alan, 2015, 'Learning for STEM literacy: STEM literacy for learning', *School Science and Mathematics*, 112(1), 12-19.